



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

**Form Self Assesment Permohonan
PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI**

I. DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan			
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan			
Deskripsi Singkat Latar Belakang Penerbitan Izin Usaha			
Contact Person (Telp/e mail)			
Deskripsi Perusahaan :			
No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)
	Total		

II ANALISA KELENGKAPAN DOKUMEN

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	Apakah Dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan yang mengajukan izin telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku:				

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
a.	Bukti Pemenuhan persyaratan modal di setor (dalam Anggaran Dasar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 6 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008.	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.8
b.	Bukti Pemenuhan Persyaratan Penempatan Deposito Jaminan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 7 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008 dan Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.8
c.	Akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang (<i>jika ada</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 9 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: I.1
d.	Susunan organisasi dan kepengurusan perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 9 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008.	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: II.2
e.	Memiliki Komisaris Independen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 6 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008.	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif
f.	Memiliki Internal Auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 UU No. 40 Th 2014	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif
g.	Pengendali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 UU No. 40 Th 2014	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif
h.	Bukti bahwa perusahaan mempekerjakan tenaga ahli dengan kualifikasi ahli dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 9 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	aktuaris perusahaan				
i.	Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Pasal 9 PP No.73/92 yang diubah PP No.39/2008</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif
j.	Neraca pembukaan dan bukti pendukungnya;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif
k.	Proyeksi keuangan untuk periode 3 (tiga) tahun yang terdiri dari : a. proyeksi neraca, b. perhitungan laba rugi, dan c. arus kas d. asumsi-asumsi yang wajar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Perusahaan menyampaikan proyeksi keuangan Indeks: III.4
l.	Penempatan akun SUN dalam Neraca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>POJK 1/2016</i>	
m.	Rencana di bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.5
n.	Daftar riwayat hidup yang dilengkapi bukti pendukungnya dari: a. Direksi b. Komisaris; c. Internal Audit; dan d. Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan yang dipekerjakan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.6.a

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
o.	Pernyataan tidak merangkap bekerja pada perusahaan lain: a. Direksi b. Komisaris; c. Internal Audit; dan d. Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan yang dipekerjakan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003 jo. Pasal 14 dan Pasal 28 POJK Nomor 2/POJK.05/2014</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.6.c
p.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): a. Perusahaan; b. Direksi; c. Komisaris; d. Internal Audit; dan e. Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Pengendali	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.7
q.	Bukti pemenuhan modal disetor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.8
r.	Bukti setor pungutan OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
s.	Uraian tentang sistem administrasi dan sistem pengolahan data yang digunakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif
t.	Alamat lengkap perusahaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.9
u.	Pernyataan dari pemegang saham yang menjelaskan bahwa: 1. sumber dana yang dijadikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003</i>	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.10

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	<p>modal tidak berasal dari Tindak Pidana Kejahatan Asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang;</p> <p>2. Ybs tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.</p> <p>3. Ybs senantiasa mengikuti dan mentaati ketentuan tentang permodalan</p>				
v.	Penerapan Program APU dan PPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POJK 39/2015	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.12
w.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Asuransi yang Baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POJK No. 2/POJK.05/2014	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.13
x.	Rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 UU No. 40/2014	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.14
y.	Kelayakan Sistem Manajemen Risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 UU No. 40/2014 POJK No. 1/POJK.05/2015	Dijelaskan lebih lanjut di analisis substantif Indeks: III.15
z.	Bagi Perusahaan Asuransi yang didalamnya terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing sudah memenuhi ketentuan:				
	1. Pihak asing mempunyai bidang usaha asuransi yang sejenis atau perusahaan <i>holding</i> yang mempunyai anak perusahaan dibidang asuransi yang sejenis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (2) hrf a. KMK 426/KMK.06/2003	
	2. Bukti rating sekurang-kurangnya A atau yang setara dengan itu dari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (2) hrf a. KMK 426/KMK.06/2003	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.				
	3. Bukti kepemilikan modal sendiri sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Asuransi yang akan didirikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (2) hrf b. KMK 426/KMK.06/2003	
	4. Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir yang menunjukkan tingkat keuangan yang sehat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (2) hrf c. KMK 426/KMK.06/2003	
	5. Perjanjian kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Susunan anggota dewan komisaris dan direksi; • Kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (2) hrf d. KMK 426/KMK.06/2003	
III. ANALISA SUBSTANTIF					
1. Anggaran Dasar					
a.	Apakah Anggaran Dasar telah menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 3 PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	menjalankan jenis usaha asuransi			dengan PP 39/2008	
b.	Apakah Anggaran Dasar telah menyatakan bahwa modal disetor telah sekurang-kurangnya berjumlah Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 6 PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 39/2008	
c.	Apakah Anggaran Dasar telah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang berkaitan dengan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu, besarnya modal ditempatkan dan disetor, dan lain-lain sesuai ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 3 PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 39/2008	
d.	Apakah jumlah Direksi dan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang (<i>Memuat pula uraian dari fungsi yang dibawahkan oleh Direksi dimaksud</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 6 dan Pasal 22 POJK No. 2/POJK.05/2014	
e.	Apakah dalam susunan anggota Direksi dan Komisaris terdapat WNA (<i>jika terdapat penyertaan langsung pihak asing</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 4 ayat (2) - PP73/1992	
f.	Apakah seluruh anggota Direksi dan Komisaris Warga Negara Indonesia (<i>khusus untuk swasta nasional</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 4 ayat (1) - PP73/1992	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
g.	Apakah kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan Asuransi telah memenuhi paling banyak 80%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 6 (4) PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 39/2008	
2. Struktur Organisasi					
a.	Apakah struktur organisasi telah ditandatangani oleh Direksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Apakah Struktur Organisasi telah menggambarkan secara jelas adanya fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan, fungsi kepatuhan, komite investasi, dan komite pengembangan produk asuransi yang terpisah satu dengan yang lainnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 39/2008 ✓ Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1), KMK 426/KMK.06/2003. ✓ Pasal 8 huruf a KMK 426/KMK.06/2003 ✓ POJK 2/POJK.05/2014 	
c.	Apakah Struktur Organisasi telah dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab dan prosedur kerja dari masing-masing unit organisasi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 huruf b KMK 426/KMK.06/2003	
d.	Apakah Perusahaan memiliki Komite-Komite di bawah			POJK No.	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	Direksi, berupa: - Komite Investasi - Komite Pengembangan Produk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2/POJK.05/2014	
e.	Apakah Perusahaan memiliki Komite-Komite di bawah Komisaris Independen, berupa: - Komite Audit - Komite Pemantau Resiko?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POJK No. 2/POJK.05/2014	
f.	Apakah Perusahaan telah menyampaikan uraian mengenai Sistem Administrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ Pasal 3 ayat (1) huruf e PP 73/92 ✓ Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 9) KMK 426/KMK.06/2003	
g.	Apakah Perusahaan telah menyampaikan uraian mengenai Sistem pengolahan data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ Pasal 3 ayat (1) huruf e PP 73/92 ✓ Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 9) KMK 426/KMK.06/2003	
3. Neraca Pembukaan					
a.	Apakah Neraca Pembukaan telah dilengkapi dengan bukti pendukungnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2) KMK 426/KMK.06/2003	
4. Proyeksi Keuangan					

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
a.	Apakah Proyeksi Keuangan untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang telah dilengkapi dengan:			<i>Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2) KMK 426/KMK.06/2003</i>	
	•Proyeksi Neraca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	•Perhitungan Laba Rugi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	•Arus Kas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Apakah Proyeksi Neraca Keuangan telah dilengkapi dengan asumsi yang wajar untuk periode 3 tahun ke depan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Rencana di bidang kepegawaian					
a.	Apakah Perusahaan telah menyampaikan rencana di bidang kepegawaian untuk 3 tahun ke depan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3) KMK 426/KMK.06/2003</i>	
b.	Apakah Perusahaan telah menyampaikan rencana pengembangan sumber daya manusia untuk 3 tahun ke depan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6. Direksi, Komisaris dan Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan					
a.	Apakah perusahaan telah menyampaikan daftar riwayat hidup dan bukti pendukung untuk : 1. Direksi; 2. Komisaris; 3. Internal Audit;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 4) KMK 426/KMK.06/2003</i>	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	4. Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan. 5. Pengendali	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
b.	Apakah pemegang saham telah menyampaikan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Internal Audit dan Pemegang Saham Pengendali perusahaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 11 ayat (1) KMK 426/KMK.06/2003	
c.	Apakah perusahaan telah menyampaikan pernyataan tidak merangkap bekerja pada perusahaan lain untuk: 1. Direksi 2. Tenaga Ahli	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 5 KMK 426/KMK.06/2003	
d.	Apakah perusahaan telah mengangkat Tenaga ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓ Pasal 3 ayat (1) huruf d PP 73/1992 ✓ Pasal 15 ayat (1) KMK 426/KMK.06/2003	
e.	Apakah kualifikasi tenaga ahli yang diangkat telah sesuai dan dapat dibuktikan dengan sertifikat gelar profesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 15 ayat (2) huruf a.KMK 426/KMK.06/2003	
f.	Apakah tenaga ahli dan/atau aktuaris perusahaan yang diangkat tidak dalam pengenaan sanksi oleh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	asosiasi dan dibuktikan dengan rekomendasi dari asosiasi yang menerbitkan gelar profesi				
g.	Apakah Tenaga ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan yang diangkat telah memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun pada bidang pengelolaan risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
h.	Apakah tenaga ahli dan/atau aktuaris perusahaan yang diangkat telah terdaftar sebagai tenaga ahli/aktuaris Perusahaan terdaftar di OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
	Apakah perusahaan telah menyampaikan NPWP untuk: 1. Perusahaan 2. Direksi 3. Komisaris 4. Internal Audit 5. Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan 6. Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (1) hrf b.KMK 426/KMK.06/2003	
8. Modal di setor dan Dana Jaminan					
a.	Apakah bukti dan jumlah pemenuhan modal di setor telah sesuai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 6 PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 39/2008	
b.	Apakah bukti penempatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 37 PMK 53/2012	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	dana jaminan telah ditempatkan pada bank yang tidak terafiliasi				
c.	Apakah dana jaminan ditatausahakan pada bank kustodian yang terdaftar di Bapepam & LK dan/atau OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 37 PMK 53/2012	
d.	Apakah penempatan dana jaminan telah dilengkapi perjanjian dengan bank kustodian yang terdapat klausula pencairan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 38 PMK 53/2012	
e.	Apakah jumlah deposito jaminan adalah sejumlah minimal 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 7 ayat (1) PP 73/1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 39/2008	
9. Alamat Perusahaan					
a.	Apakah perusahaan telah menyampaikan alamat perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 10) KMK 426/KMK.06/2003	
b.	Apakah alamat perusahaan telah dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10. Pemegang Saham					
a.	Apakah perusahaan telah menyampaikan pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang dijadikan modal tidak berasal dari Tindak Pidana Kejahatan Asal sebagaimana dimaksud dalam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 11 KMK 426/KMK.06/2003	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang				
b.	Apakah perusahaan telah menyampaikan pernyataan dari pemegang saham bahwa yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 11 ayat (2) KMK.426/KMK.06/2003	
c.	Apakah perusahaan telah menyampaikan surat pernyataan dari pemegang saham bahwa yang bersangkutan senantiasa mengikuti dan mentaati ketentuan tentang permodalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Apakah perusahaan telah menyampaikan surat pernyataan dari pemegang saham bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e.	Apakah PSP telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		No. KEP - Tanggal
f.	Apakah perusahaan telah menyampaikan bagan struktur struktur kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham ultimate <i>shareholder/ beneficial owner</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
g.	Laporan Keuangan Pemegang Saham (<i>audited</i>) terakhir dan laporan keuangan terkini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Lampiran 3

Surat Direktur Kelembagaan dan Produk

IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
11. Program Asuransi yang akan di pasarkan					
a.	Apakah perusahaan telah menyampaikan spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 9 ayat (1) huruf e PP 63/1999	
b.	Apakah perusahaan telah mengirimkan surat laporan produk asuransi baru ke OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c.	Apakah spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan telah layak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d.	Apakah perusahaan telah menyampaikan contoh polis asuransi beserta ketentuan umum polis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e.	Apakah perusahaan telah menyampaikan program reasuransi untuk program asuransi yang dipasarkannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
f.	Surat dukungan reasuransi dari perusahaan reasuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12. Penerapan Program APU dan PPT					
a.	Apakah penerapan program APU dan PPT telah ditandatangani oleh Direksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Apakah perusahaan telah menyampaikan penerapan program APU dan PPT, yang memuat: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POJK 39/2015	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.				
f.	Apakah sudah ada unit khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Asuransi yang Baik					
a.	Apakah pedoman tata kelola telah ditandatangani oleh Direksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Apakah perusahaan telah menyampaikan pedoman prinsip tata kelola perusahaan asuransi yang baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POJK No. 2/POJK.05/2014	
14. Kelayakan Rencana Kerja					
a.	Apakah rencana kerja telah ditandatangani oleh Direksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b.	Apakah perusahaan telah menyampaikan rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama yang memuat: a. Ringkasan Eksekutif b. Kebijakan dan Strategi Manajemen c. Penerapan manajemen risiko dan kepatuhan d. Kinerja perusahaan saat ini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POJK No 2/POJK.05/2014	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	e. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan f. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya g. Rencana permodalan h. Rencana investasi i. Rencana reasuransi j. Rencana pengembangan produk dan pemasaran produk k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor l. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)				
c.	Apakah rencana kerja Perusahaan telah diverifikasi oleh Lembaga Independen?				
15. Kelayakan Sistem Manajemen Risiko					
a.	Apakah sistem manajemen risiko telah ditandatangani oleh Direksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POJK Nomor 1/POJK.05/2015	
b.	Apakah perusahaan telah menyampaikan sistem manajemen risiko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 UU No. 40/2014 POJK No. 1/POJK.05/2015	
16. Perikatan dengan pihak terafiliasi (jika ada pengalihan fungsi ke pihak lain)					
	Apakah perusahaan menyampaikan mengenai perikatan dengan pihak terafiliasi dan kebijakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 UU No. 40/2014 Pasal 63 POJK No. 2/POJK.05/2014	

Lampiran 3Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :

No.	URAIAN	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Hasil Analisis
	pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha				
17. Infrastruktur yang mendukung					
	Apakah perusahaan telah memiliki sistem informasi yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 UU No. 40/2014	Mengirimkan dokumen pendukung berupa: - SOP IT - Manual Sistem
18. Informasi dari Pengawas di Negara Asal (jika pemegang saham merupakan badan usaha asing)					
	Apakah perusahaan menyampaikan konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing apabila dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 8 UU No. 40/2014	
19. Hal pendukung					
	Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat			Pasal 8 UU No. 40/2014	
	a. Dokumen pendukung lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumentasi yang cukup.

Jakarta,
Direksi (PT A)

tanda tangan

Lampiran 3

Surat Direktur Kelembagaan dan Produk

IKNB

Nomor :

Tanggal :

(Nama)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Divisi		
Direview Deputi Direktur		

Keterangan:

Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".

Lampiran 3

Surat Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB

Nomor :

Tanggal :